

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELATIHAN SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN PADA KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SEKTOR JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

¹Sab'an Nasrullah, ²Bambang Irawan
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiemi
¹alulrasyd@gmail.com, ²bambang.irawan@stiemi.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

This study aims to find out the implementation of community participation in the training of environmental fire resistance system in the fire prevention and rescue office of the new johar sector of Central Jakarta. In order for community participation in the training of environmental fire resistance system to run properly requires awareness and awareness of the community to participate in the success of the program.

The research method used qualitative descriptive and data collecting technique by interview, observation, literature study and documentation in collecting data which will be the material in this research writing and the researcher took the location at the fire management and rescue office of Johar Baru Sector, Central Jakarta.

The result of the research shows that the community's participation has been done well and done, proved by the community members who participated in the training of environmental fire protection system in the area of fire and rescue office of Johar Baru Sector of Central Jakarta. And also the training is carried out in the kelurahan-kelurahan in new Johar district, but in the process of establishment there are still obstacles and obstacles such as lack of communication or socialization to the citizens and the difficulty of community members to participate in SKKL training and the solution is needed a persuasive and conducive approach, focus on improving the capacity of communities who volunteer to participate in SKKL training to participate rather than just achieving certain predetermined goals

Keywords

Community Participation,
Training of Environmental Fire
Resilience System (SKKL).

PENDAHULUAN

Kejadian bencana merupakan bentuk ancaman yang frekuensinya meningkat saat ini, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang terjadi di wilayah Jakarta yang merupakan tantangan dan risiko yang harus di hadapi serta perlu diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat. Kebakaran di pemukiman, selama ini selalu menjadi momok yang menakutkan bagi siapapun yang mengalami. Kalau sudah terjadi peristiwa bencana kebakaran, harta benda ludes terbakar. bahkan, tak jarang jiwa melayang.

Di wilayah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun, ratusan peristiwa kebakaran pemukiman terjadi. Kebakaran di pemukiman, meski hampir tak bisa dicegah, namun, paling tidak bisa diminimalisir dengan upaya pemadaman sedini mungkin. Dan untuk melakukan operasi pemadaman sedini mungkin itu, tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh petugas/jajaran Penganggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk bahu-membahu dan gotong royong secara bersama-sama mengatasi peristiwa kebakaran ini. Dalam upaya menanggulangi ancaman bahaya kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk, Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Pusat meluncurkan program SKKL. Program ini bertujuan dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran. dengan membentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL). Pembentukan SKKL ini diterapkan pada semua kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan yang berada di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian diteruskan kepada masing-masing sektor per Kecamatan di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk pada kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar baru yang menjadi Lokasi fokus (Lokus) peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, yang terdiri dari, Kelurahan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa, Kelurahan Galur dan Kelurahan Tanah Tinggi, merupakan wilayah pemukiman yang padat penduduk dan rawan terjadinya peristiwa bencana kebakaran, hal ini terlihat dari peta wilayah yang berada di kantor Kecamatan Johar Baru sangatlah padat pemukiman hingga sulit kendaran operasional tim pemadam memasuki wilayah tersebut. Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat dalam melaksanakan Program dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, mengadakan perekrutan para sukarelawan yang anggotanya dari tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama yang informasikan melalui kantor Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Johar baru. Tujuan pembentukan dan pembinaan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah untuk pengelolaan suatu sistem sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya peristiwa bencana kebakaran, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembentukan SKKL ini, adapun pesertanya terdiri dari 40 orang bahkan lebih berdasarkan data yang ada banyak antusiasme warga yang ingin ikut. Relawan kebakaran yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan warga, pembentukan organisasi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya di fasilitasi oleh kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat. Berikut data SKKL yang terbentuk dapat terlihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data SKKL Sekecamatan Johar baru

No	Nama	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Kelurahan Galur	3 orang	Terbentuk SKKL
2	Kelurahan Kampung Rawa	2 orang	Terbentuk SKKL
3	Kelurahan Johar Baru	3 orang	Terbentuk SKKL
4	Kelurahan Tanah Tinggi	2 orang	Terbentuk SKKL
Total		10 orang	

Sumber: Data Damkar Kecamatan Jobar Baru 2017

Berdasarkan dari data tabel 1.1 diatas telah terbentuk tim SKKL yang akan dibekali dengan pelatihan baik secara teori maupun praktek lapangan langsung cara memadamkan kobaran api dalam bentuk ilustrasi. Dengan terbentuknya tim SKKL ini masing-masing wilayah kelurahan peserta tersebut dapat mengajarkan kembali kepada masyarakat untuk dapat menanggulangi kebakaran dini bilamana terdapat peristiwa kebakaran diwilayahnya, sebelum petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat datang memberikan pemadaman. Sumber data yang ada pada Kantor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini kejadian kebakaran mencapai 140 kali peristiwa kebakaran. Ironisnya, justru menurut catatan Kantor Penaggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat Peristiwa kejadian kebakaran lebih banyak terjadi di lingkungan pemukiman yang padat penduduk. Menurut pemantauan Kantor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan sedikitnya ada 80 titik rawan kebakaran yang tersebar di 2 kelurahan yakni: pada Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur Jakarta Pusat.

Pada saat memberikan bentuk pelatihan SKKL diharapkan dukungan dari pemimpin wilayah setempat seperti Lurah, Camat serta masyarakat tentunya dan ini sangat penting di ikuti agar bisa mengatasi secara dini sekaligus mencegah terjadinya kebakaran dalam skala lebih besar. Materi yang diajarkan dalam pelatihan ini adalah teori dan praktik langsung. Dalam praktik, peserta diajarkan cara pemadaman dengan menggunakan karung basah dan alat pemadam api ringan (Apar). Dengan adanya pelatihan dalam SKKL yang di pelajari oleh masyarakat dapat mengantisipasi kebakar dini bilamana terjadi dan di dalam pelatihan anggota SKKL juga mendapatkan pelatihan secara praktek langsung, bagaimana mengatasi kebakaran

dengan cepat dan dengan apalat apa adanya yang ada pada sekitar pemukiman masyarakat, disamping itu dalam materi pelatihan anggota SKKL juga di bekal perlengkapan pemadam kebakaran seperti, gas oksigen berukuran sedang, pemasangan hydrant air pada wilayah masing-masing, alat komunikasi HT, serta kendaraan bermotor yang berbentuk seperti mobil kebakaran didalamnya terdapat selang air, alat pompa air dan lain sebagainya.

Kantor Penganggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat, tentu tidak bisa sendiri diperlukan partisipasi dari masyarakat karena, untuk mengatasi kebakaran bilamana terjadi peristiwa bencana kebakaran di wilayah pemukiman, yang paling dekat dan paling bisa melakukan upaya pemadaman, adalah masyarakat itu sendiri, meski tidak seperti operasi pemadaman yang biasa dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, namun, dengan operasi pemadaman dini yang dilakukan oleh masyarakat dapat memperlambat menjalarnya api hingga ke tempat yang lainnya, hal tersebut dapat meminimalisir tingkat kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa bencana kebakaran.

Untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan operasi pemadaman dini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 mengenai Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disebutkan dalam Pasal 2 Bab II mengenai pencegahan umum bahwa: Setiap penduduk "wajib aktif" berusaha mencegah terjadinya bencana kebakaran sedini mungkin, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan umum. Jadi sudah jelas, harus dicermati, bahwa usaha-usaha penanggulangan kebakaran yang mencakup pencegahan sampai pemadaman, adalah bagian dari kewajiban warga masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Sejauh ini, tidak semua warga masyarakat DKI Jakarta yang mempunyai keterampilan untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran. Dari aspek pencegahan saja, dapat dilihat bagaimana penduduk di pemukiman padat hunian, membuat rumah-rumah tempat tinggal mereka dengan bahan yang mudah terbakar. begitu juga dengan hal lain, seperti semerawutnya sambungan kabel di rumah-rumah, ketidak disiplin dalam menggunakan sarana rumah tangga yang mudah terbakar seperti kompor minyak, kompor gas, setrika, dan peralatan elektronik lainnya. Sudah itu, di perumahan padat penduduk pun hampir bisa dipastikan tak ada sama sekali sarana dan prasarana pemadaman, seperti hydrant air, alat pemadam api ringan (Apar) dan karung basah saja tidak.

Berdasarkan hasil observasi awal di temukan fenomena yang terjadi merupakan sumber penyebab kebakaran di kawasan pemukiman karena akibat kecerobohan masyarakat. Adanya masyarakat yang mengisi minyak tanah pada saat kompor dalam keadaan menyala, meninggalkan peralatan rumah tangga beraliran listrik yang tetap menempel pada stop kontak, tingginya frekwensi kebakaran di pemukiman padat penduduk juga disebabkan oleh lingkungan pemukiman yang tidak kondusif, adanya bangunan dengan material yang mudah terbakar, masih terbatasnya personel/anggota pemadam dalam menangani kebakaran yang mengingat wilayah Kecamatan Johar Baru begitu lausnya, disamping itu sulitnya mobil pemadam masuk ke wilayah yang kondisi jalannya terlalu sempit, kurang sabarnya masyarakat karena panik hingga mengakibatkan bentrokan adau mulut dengan petugas pemadam. Atas uraian diatas dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, namun fenomena yang ada partisipasi masyarakat masih kurang tanggap dan peduli seperti; kurang tanggapnya warga masyarakat atas bencana yang terjadi, tidak adanya respon masyarakat sewaktu petugas pemadam mengajak untuk ikut Pembentukan dan pelatihan SKKL, kurang sadarnya warga masyarakat akan pentingnya pencegahan dini peristiwa kebakaran sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti program SKKL

Dalam hal pelatihan setelah di bentuknya SKKL terdapat fenomena yang mengakibatkan hasil kerja peserta SKKL tidak maksimal dalam melakukan tugasnya atas kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Johar Baru seperti; adanya peserta SKKL yang masih panik bila melihat kebakaran meskipun sudah di ajarkan dalam pelatihan, kurang sadarnya peserta SKKL untuk selalu merawat alat pemadam yang di berikan dari kantor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor Johar Baru karean perawatan merupakan bagian dari pelatihan secara praktek, peserta SKKL dalam menangani kebakaran tidak memakai pengaman diri seperti masker dan helm dan lain-lain yang telah diberikan dalam proses pelatihan, di samping itu yang menjadi inti dari peristiwa bencana kebakaran adalah kecerobohan masyarakat bila terjadi bencana masing-masing memikirkan keselamatan diri dan sering panic karena memang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran. Selanjutnya fenomena dari materi pelatihan yang ada seperti; adanya peserta pelatihan masih belum faham meskipun sudah diajarkan secara berulang-ulang, daya tanggap peserta yang lamban di karenakan peserta pelatihan tidak di batasi usianya, materinya terlalu rumit sehingga peserta

pelatihan susah untuk menghafalkan, peserta pelatihan terlalu lelah sehingga materi pelatihan yang di berikan kurang di serap oleh peserta pelatihan.

KAJIAN TEORI

Masyarakat modern dewasa ini tidak bisa lepas dari administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti yang lebih luas. Dalam arti sempit, sebagaimana dikemukakan Wahyuddin (STIAMI, 2010:4) administrasi cenderung berurusan dengan ketata usahaan (*clerical works*) yang pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian dan bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi serta mencakup setiap pengaturan yang rapi, sistematis dan tertulis. Dalam arti luas, Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi diartikan sebagai keiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Definisi lainnya yang dapat diajukan adalah kegiatan implementasi kebijakan. Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan. Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih berkembang administrasi publik disamakan dengan administrasi negara. Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik dan by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik. Sedangkan publik dapat diartikan sebagai negara, klien, konsumen, warga masyarakat, dan kelompok kepentingan, administrasi publik disamakan dengan administrasi negara.

Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Irene, (2011:50) merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya pada pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Macam-Macam Partisipasi

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Siti Irene A.D., 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan.

Bentuk Dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat sebagai berikut:

Selanjutnya Pasaribu dan Simanjutak, (2015:11) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Tipe Partisipasi

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

Proses Partisipasi

Dalam berbagai program pembangunan para praktisi pembangunan pun telah melakukan persiapan sosial agar program tersebut benar-benar menyentuh kepentingan, kebutuhan dan masalah masyarakat melalui tahapan-tahapan keikutsertaan masyarakat, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan juga tingkat keikutsertaan masyarakat. Persiapan sosial ini dimaksudkan agar setiap paket pembangunan dapat dikomunikasikan secara efektif dan efisien.

Analisis proses partisipasi atau keikutsertaan masyarakat ini menjadi sangat penting karena dengan demikian usaha komunikasi program pembangunan ke dalam masyarakat akan memperoleh hasil yang maksimal. Analisis yang di maksud adalah:

1. Tahapan penumbuhan ide untuk membangun dan perencanaan

Dalam tahap ini kita harus melihat, apakah pelaksanaan program tersebut didasarkan ats gagasan atau ide yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri atau diturunkan dari atas. Jika datangnya dari masyarakat itu sendiri karena didorong oleh tuntutan situasi dan kondisi yang menghimpitnya pada saat itu maka peran aktif masyarakat akan lebih baik dan juga sebaliknya. Jika masyarakat

diikut melibatkan di dalam proses perencanaan untuk membangun daerahnya, maka dapat dipastikan bahwa seluruh anggota masyarakat merasa dihargai sebagai manusia yang dihargai sebagai manusia yang memiliki potensi dan kemampuan sehingga mereka lebih mudah berperanserta aktif dalam melaksanakan, melestarikan program pembangunan tersebut.

2. Tahap Pengambilan Keputusan

Landasan filosofi dalam tahapan ini adalah prinsip *learning by doing* dalam metode belajar orang dewasa. Tujuan melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan adalah agar masyarakat dapat mengetahui secara baik tentang cara-cara melaksanakan program sehingga nantinya mereka secara mandiri mampu melanjutkan, meningkatkan, serta melestarikan program pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan lainnya adalah untuk menghilangkan kebergantungan masyarakat terhadap pihak luar (komunikator atau penyuluh). Sedangkan dalam hal mengevaluasi, masyarakat diarahkan untuk mampu menilai sendiri dengan mengungkapkan tentang apa yang mereka tahu dan apa yang mereka lihat. Mereka diberi kebebasan untuk menilai sesuatu dengan apa yang ada dibenaknya, pengalaman, kelebihan, kelemahan, manfaat, hambatan dan faktor pelancar dari program tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ada 4 poin yang dapat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Denzim *dalam* Satori dan Aan (2010:23):

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki”.

Sedangkan definisi pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) mengemukakan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada general

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah yaitu obyek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti memasuki obyek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Sedangkan menurut Satori dan Aan (2010:22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat

dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Jenis Penelitian

Ada berbagai jenis penelitian yang dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitiannya. Salah satu jenis penelitian ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.

Sedangkan pengertian penelitian deskripsi analisis adalah penelitian dimulai dengan penjelasan terlebih dahulu atas definisi-definisi suatu istilah, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan masalah-masalah yang timbul atas suatu fenomena, terakhir melakukan analisis atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Creswell (2012:502) :

“Gunakan penelitian naratif bila ada orang yang mau menceritakan kisah mereka dan ingin melaporkan cerita mereka, gunakan penelitian naratif saat cerita diceritakan mengikuti kronologi acara. Penelitian naratif adalah sastra dari penelitian kualitatif dengan ikatan yang kuat dengan sastra, dan ini memberikan pendekatan kualitatif yang dapat menulis dalam bentuk persuasif dan sastra”.

Berdasarkan definisi tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Karena dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya dengan menjelaskan mengenai definisi-definisi dari Partisipasi Masyarakat Dalam Pelatihan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan Pada Kantor Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat. Selain itu juga akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dari Partisipasi Masyarakat Dalam Pelatihan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. Dibentuknya organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ini merupakan perwujudan tanggung jawab Pemda DKI dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Dalam mewujudkan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada warga kota tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran, sesuai dengan yang diatur dalam SK Gub Nomor 9 tahun 2002, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta, mempunyai 3 tugas pokok, yakni:

1. Pencegahan Kebakaran.
2. Pemadaman Kebakaran, dan
3. Penyelamatan Jiwa dan ancaman kebakaran dan bencana lain, untuk lebih mengenali tentang sosok atau profil Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta

Secara struktural perubahan organisasi pemadam kebakaran tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Nomor 9 Tahun 2002, tanggal 15 Januari 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta. Beberapa perubahan yang menonjol pada Skep Gubernur di atas, di antaranya adalah:

- a. Dileburnya Bagian Keuangan dan Bagian Kepegawaian ke dalam satu Bagian, yakni Bagian Tata Usaha; sehingga jika pada masa sebelumnya pada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran terdapat 17 eselon III, maka melalui perubahan ini berkurang menjadi hanya 15 eselon III;
- b. Dibentuknya divisi baru, yakni Subdinas Penyelamatan (Rescue). Hal ini dimaksudkan sebagai jawaban terhadap tantangan kota Jakarta sebagai sebuah kota besar di mana potensi terjadinya bencana massal akan sangat besar dan jenisnya bervariasi (bencana kebakaran, banjir, bangunan runtuh, tumpahan bahan-bahan berbahaya, kecelakaan transportasi, dan lain sebagainya). Oleh karenanya potensi tersebut perlu ditangani oleh satuan petugas khusus yang terlatih dan profesional.

c. Terdapat pengembangan pada tingkat/ jajaran Suku Dinas melalui pendekatan konsep Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); tujuan dari penerapan konsep ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memper-sempit daerah/wilayah kerja ke dalam satuan-satuan WMK;

Melalui konsep ini, setiap satuan Wilayah Manajemen Kebakaran /WMK dipimpin oleh seorang kepala seksi sektor atau kurang lebih membawahi satu wilayah kecamatan. Setiap Wilayah Manajemen Kebakaran /WMK akan menempati kantor Sektor yang berisi 4 (empat) unit mobil pemadam kebakaran dengan berbagai variasi sesuai dengan karakteristik daerah/ wilayah yang dilayaninya; Masing-masing Wilayah Manajemen Kebakaran /WMK membawahi minimal 4 (empat) pos pemadam kebakaran, yang masing-masing pos berisi 1 sampai 2 unit mobil pemadam kebakaran. Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat, merupakan pengembangan dari kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat yang keberadaannya di wilayah Kecamatan-Kecamatan tujuannya adalah untuk menjangkau bilamana terjadi peristiwa bencana kebakaran. Kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat termasuk kedalam wilayah Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat yang mempunyai luas wilayah 238,16 hektar, dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 110.700 jiwa, dan kepala keluarga sebanyak 27.356. Dengan alamat Jl. Percetakan Negara II No.477, RT.12/RW.3, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560Telepon: (021) 4200508Provinsi: Jakarta.



Adapun Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi, sebagai berikut:

Visi

Terciptanya rasa aman masyarakat dari kebakaran dan bencana lain.

Misi

Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan pemadaman dan penyelamatan

Meningkatkan ketahanan Lingkungan bersama masyarakat

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya.

Kesimpulan

Bedasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pelatihan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan(SKKL) yang meliputi :
 - a. Kecakupan, mengajak semua kalangan masyarakat yang berada pada wilayah Kecamatan Sektor Johan Baru

- b. Kerjasama, diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak dari semua warga masyarakat.
 - c. Pemberdayaan (*Empowerment*), Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling.
 - d. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa.
 - e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*), Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
 - f. Transparansi, Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelatihan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) yang meliputi:
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti SKKL dan penanggulangan dan pencegahan kebakaran dini di wilayah Sektor Johar Baru Jakarta Pusat
 - b. Tidak adanya Komunikasi yang baik dalam mengikuti SKKL dan pentingnya partisipasi masyarakat guna kesiapsiagaan masyarakat bilamana terjadinya peristiwa bencana kebakaran
 - c. Kurangnya Kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat akan wilayahnya bilamana terjadi peristiwa kebakaran, sehingga warga akan panik dan bingung, karena tidak mau mengikuti SKKL di wilayah Sektor Johar Baru Jakarta Pusat.
 3. Solusi yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelatihan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)
 - a. Berupaya untuk memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun mereka sendiri secara lebih berarti dengan mengikuti pelatihan SKKL.
 - b. Berupaya untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan ide kreatif dan inisiatif-inisiatif yang bersifat membangun.
 - c. Fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat yang dengan sukarela mengikuti pelatihan SKKL untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya.
 - d. Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *Response time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman petugas dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/penyempotan air pertama).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran bagi kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat yaitu:

1. Perlunya penambahan peserta SKKL pada masing-masing Kelurahan
2. Penambahan armada operasional kendaraan pada kantor penanggul: kebakaran dan Penyelamatan Sektor Johar Baru Jakarta Pusat.
3. Hendaknya untuk bersosialisai kepada masyarakat frekwensinya lebih di tingkatkan dan secara berkala
4. Peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan pada setiap peserta SKKL dan petugas pemadam kebakaran Sektor Johar Baru Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta.
- Ali, Nurman 2011. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali, Faried. 2011. *Metodologi Sosial Dalam Bidang Ilmu Admisnistrasi Dan Pemerintahan* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, J., W., 2012. *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*; Cetakan Ke 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cohen and Uphoff, Irene. Siti 2011 *Rural Development Participation, Concept and Measure for Project Design, Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University.
- Dessler, Gery. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi ke-10. Jakarta Barat. PT. INDEKS.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: RinikaCipta.
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irene, Astuti Siti 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Bandung* : Angkasa.
- Kamil. M. 2012. *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Latunreng, Wahyuddin, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 2, Jakarta: IPPSDM-WIN.
- Michael J. Jucius Kamil 2012, *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mathis. L. Robert dan Jackson. H. John. 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Buku kedua.
- Marzuki, Saleh. H.M. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Penerbit Rosda. Mercer
- Pasaribu & Simanjuntak. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat* Jakarta: Pustaka Utama.
- Robbins, S. P. & Timothy, A.J. 2007. *Organizational Behavior*, 12nd edition, Prentice-Hall, New Jersey.
- Simamora, Kamil 2012. *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyah 2010, *Manajemen Sumber Daya manusia*, Yogyakarta: UNY.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 201). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono and Esterberg 2013. *Metode Penelitian Manajemen* Cetakan Ke-19, Penerbit Alfabeta, CV. Bandung.
- Sunyoto, D, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sundariningrum. 2011. *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____ Perda No 3 tahun 1992 *Mengenai Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota*.
- _____ Yusran Nasution (2012) *Jurnal Vol 6 Nomor 4 Februari 2012 Dengan Judul Mitigasi Kebakaran Melalui Masyarakat Upaya dini pencegahan kebakaran menurunkan resiko kecelakaan di lingkungan permukiman padat perkotaan*.
- _____ Steven (2011) *denan Judul: Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanganan pra bencana kebakaran dan partisipasi masyarakat di tingkat komunitas (Studi Kasus pada masyarakat RW 02 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat)*.
- _____ Siti Sawerah (2016) *Dengan Judul Partipasi Masyarakat Dalam pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat*.